

Gubernur Bali Pastikan KUHP Baru Justru Jamin Privasi Wisatawan

DENPASAR (IM)- Gubernur Bali, Wayan Koster menyampaikan keterangan resmi bahwa dia memastikan pasal yang menimbulkan polemik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru justru menjamin privasi wisatawan.

“Berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam KUHP yang baru, wisatawan yang berkunjung ke Bali atau sudah ada di Bali sama sekali tidak perlu merasa khawatir terhadap berlakunya KUHP, karena ketentuan yang baru justru lebih baik, sehingga lebih menjamin privasi dan kenyamanan setiap orang,” kata dia dalam siaran resmi Humas Pemprov Bali, Senin (12/12).

Berdasarkan hasil pertemuan Gubernur Koster dengan sejumlah unsur pariwisata di Jayasabha, Denpasar, disampaikan bahwa selama ini pemerintah dan masyarakat Bali selalu menghormati kedatangan dan keberadaan wisatawan termasuk privasinya.

Dia mengatakan baik wisatawan asing maupun domestik selalu dilayani secara profesional, sopan santun, serta komunikatif dalam penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali yang bersumber pada kearifan lokal Sad Kerthi.

“Pemerintah dan masyarakat Bali mengembangkan kepariwisataan berlandaskan kebudayaan Bali yang bersumber pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Sad Kerthi serta berbasis taksu Bali sebagaimana diatur dalam Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali,” ujarnya.

Namun sejak resminya KUHP baru oleh DPR RI pada Selasa (6/12) lalu muncul sejumlah pemberitaan yang menimbulkan kegelisahan bagi kepariwisataan Bali, seperti kabar soal pembatalan perencanaan ke Bali dari Australia, hingga isu pengetatan perjalanan menuju Indonesia.

Koster menjelaskan bahwa KUHP baru terutama pasal 411 yang mengatur perzinahan dan pasal 412 yang mengatur

tentang hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan, baru berlaku tiga tahun sejak disahkan, dan sesungguhnya tidak secara khusus mengatur hubungan seksual pranikah.

“Kedua ketentuan tersebut bukan dikualifikasikan sebagai delik umum yang pelaksanaannya secara serta merta dapat ditanggapi dan atau dituntut, melainkan merupakan delik aduan yang hanya dapat dituntut jika ada yang mengadukan,” ujarnya.

Adapun yang dapat mengadukannya telah diatur dalam KUHP baru yaitu suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan atau orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Orang nomor satu di Pemprov Bali itu menyebut ketentuan tersebut sejatinya bukan hal baru, dalam KUHP terdahulu, pidana atas kasus serupa telah diatur dalam pasal 284, dan hingga saat ini belum pernah menimbulkan permasalahan bagi wisatawan, termasuk gangguan terhadap privasi wisatawan yang berkunjung atau tinggal di Bali.

Selain itu, Pemprov Bali juga memastikan bahwa tidak akan ada pemeriksaan status perkawinan pada saat check in di akomodasi wisata, seperti hotel, villa, apartemen, guest house, pondok wisata dan spa.

Begitu pula dengan aksi sweeping atau pemeriksaan status perkawinan oleh aparat penegak hukum maupun oleh kelompok masyarakat, serta menjamin kerahasiaan data wisatawan yang menginap di akomodasi wisata.

“Pemprov Bali memastikan tidak ada perubahan kebijakan berkaitan dengan berlakunya KUHP yang baru serta memastikan kenyamanan dan privasi wisatawan melalui penyelenggaraan kepariwisataan Bali yang berkualitas serta bermartabat,” tegas gubernur.

Dengan keterangan resminya itu, Koster menunggu kedatangan wisatawan dan berharap mereka tidak ragu berkunjung ke Bali, karena Bali sama seperti sebelumnya yang dikatakan nyaman serta aman dikunjungi. ● **pra**



SIDAK PASAR TRADISIONAL JELANG NATAL DAN TAHUN BARU

Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan (kanan) berdialog dengan pedagang saat sidak harga sembako di Pasar Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (12/12). Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan stabilitas harga-harga barang kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru.

AGAR TAK TERJERAT KASUS HUKUM

Anggota DPR Dorong Kades di Kabupaten Tangerang Kelola Dana Desa dengan Baik

Ketika dana desa bisa dikelola dengan baik, maka kepala desa diyakini mampu mengembangkan desanya menjadi desa yang mandiri, memiliki daya saing dan memberikan lapangan kerja kepada masyarakat desanya.

TANGERANG (IM) - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) RI akan mendorong para kepala desa (Kades) di

Kabupaten Tangerang agar lebih baik dalam mengelola dana desa sehingga dapat menciptakan desa yang berkualitas. Anggota Komisi XI DPR

RI, Andi Achmad Dara menilai bahwa, kepala desa di Kabupaten Tangerang perlu diberikan pembekalan tentang pengetahuan tata cara mengelola keuangan yang bersumber dari dana desa. Katanya, hal tersebut agar para Kades tidak masuk kepada masalah yang menjadi temuan yang berujung terjerat kasus hukum.

Lanjut Andi, maka dari itu pihaknya melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) serta Badan Pe-

ngelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang memberikan pemahaman terkait pelaporan keuangan desa yang benar. “M u d a h m u d a h a n Kadesnya dapat mengerti dengan baik apa yang menjadi tanggung jawab, karena dana Desa ini kan besar nilainya,” katanya, Senin (12/12).

Menurut Andi, ketika dana desa bisa dikelola dengan baik, maka kepala desa diyakini mampu mengembangkan desanya menjadi desa yang man-

diri, memiliki daya saing dan memberikan lapangan kerja kepada masyarakat Desanya. Terlebih, kata Andi, saat ini besaran dana desa sudah mencapai Rp1,6 Milyar.

“Kepala desa kan mesti cerdas melihat potensi wilayahnya. Misalnya daerah tertentu itu bisa jadi satu konsentrasi pertanian yang baik, peternakan yang baik atau bisa jadi destinasi daerah tujuan berlibur,” pungkasnya. ● **pp**

Camat Periuk Tinjau Pembagian Bansos BBM Inflasi Kota Tangerang



TANGERANG (IM) - Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Sosial kembali menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) sebagai upaya pengendalian inflasi daerah serta membantu meringankan beban masyarakat.

Wali Kota Tangerang H. Arief R. Wismansyah mengatakan BST dananya bersumber dari dana APBD Kota Tangerang.

“Anggaran yang disiapkan sebesar 6,2 Miliar rupiah,” ungkap Wali Kota saat meninjau penyaluran BST beberapa waktu lalu.

“Semoga masyarakat bisa tetap beraktivitas dengan baik,” sambungnya.

Sementara Camat Periuk

H.Nanang Kosim, S.Sos., M.Si saat meninjau Bansos BBM Inflasi di Kecamatan Periuk mengatakan bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam kondisi sekarang ini.

“Alhamdulillah dengan adanya bansos inflasi bisa membantu masyarakat untuk membeli bahan pokok sembako dan bagi pedagang uangnya bisa buat tambah modal usaha kecilnya seperti UMKM,” ujarnya Jumat (9/12).

Ia berharap kedepan penerima bansos adalah tepat sasaran, penerima BST ini merupakan warga yang terdapat di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan belum per-

nah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi Banten.

“Rata - rata penerimanya DTKS keluarga prasejahtera, ada juga yang pengemudi angkutan umum dan Ojol, di Kecamatan Periuk kurang lebih ada 400 Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” tuturnya..

Salah satu penerima BST Hasan (45) menjelaskan dirinya mengaku BST ini sangat berguna terlebih imbas kenaikan harga BBM.

“Ditambah anak sekolah juga sudah mulai aktif, alhamdulillah ada tambahan buat anak sekolah,” tuturnya. ● **(Adv)**



Pemkab Lebak Bagikan Peta Desa untuk Nihilkan Konflik Antarbatas

LEBAK (IM)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak membagikan peta desa untuk menihilkan konflik perselisihan antardesa di wilayahnya. Sehingga kebijakan itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Jika tidak ada konflik perselisihan itu tentu kehidupan masyarakat aman, damai dan kondusif,” kata Kepala Sub Bagian Kewilayahan dan Pemerintahan Kabupaten Lebak, Ahmad Saepul Husni dalam keterangannya di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Senin (12/12).

Pembagian peta desa itu dilakukan di 340 desa dan lima kelurahan di Kabupaten Lebak. Manfaat peta desa itu untuk menunjukkan kejelasan batas dan luasnya secara definitif juga memastikan jumlah penduduk.

Selama ini, kata dia, kerap kali

terjadi konflik perselisihan antardesa dan kelurahan khususnya di perbatasan wilayah desa maupun domisili penduduk warga. Dengan demikian, pembagian peta desa itu dapat menihilkan konflik perselisihan antardesa dan kelurahan tersebut.

“Kami berharap pemerintah desa dan kelurahan fokus untuk membangun wilayahnya, karena sudah memiliki peta desa dan kelurahan itu,” kata Ahmad.

Menurut dia, pemetaan desa tersebut difasilitasi oleh orang Badan Informasi Geospasial (BIG) dan di Banten hanya Lebak dan Serang.

Pemetaan desa itu sesuai keputusan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 45 Tahun 2016. Sehingga peta desa memiliki kekuatan hukum untuk

dijadikan dasar perencanaan pembangunan.

“Kami berharap dengan pembagian peta desa itu dapat menunjang percepatan pembangunan di pemerintah desa dan kelurahan,” kata Ahmad.

Kepala Desa Brunai, Kecamatan Cihara, Hasan mengatakan, pihaknya merasa lega setelah menerima pembagian peta desa. Sehingga memiliki kejelasan tapak batas dan luas wilayahnya, termasuk penduduk.

Pembagian peta desa dari pemerintah daerah itu, sehingga tidak ada lagi konflik perselisihan antardesa. “Kami tentu membangun desa itu harus berdasarkan wilayahnya sesuai peta desa,” kata Hasan. ● **pra**

DPRD Tangerang Minta Warga Antisipasi Bencana Alam Jelang Pergantian Tahun

TANGERANG (IM)- Menjelang pergantian tahun, intensitas hujan seringkali meningkat. Karenanya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang mengingatkan masyarakat untuk terus mewaspadai ancaman bencana di musim hujan.

Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo, menyebutkan, berdasarkan data dari BPBD Kota Tangerang, terdapat 18 kelurahan yang rawan banjir. “Di Kota Tangerang ada 18 kelurahan yang rawan banjir, sehingga perlu diwaspadai. Angin puting beliung dan longsor juga perlu diwaspadai,” katanya, belumlama ini.

Wakil rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan ini menekankan agar warga di semua wilayah Kota Tangerang untuk mewaspadai pintu air, debit sungai, pohon-pohon tinggi terutama di tepi jalan dan dekat permukiman.

Gatot juga mengungkapkan, Pemkot Tangerang melalui BPBD saat ini sudah responsif terhadap potensi dan penanganan bencana. Selama ini, DPRD berkoordinasi dengan BPBD dan sinergi berjalan baik.

“Ada yang perlu dilakukan

oleh warga yaitu meningkatkan kesadaran diri dan tanggap menjaga lingkungannya. Ini terkait perilaku, perlu diingatkan, perlu memotivasi masyarakat untuk membuang sampah yang benar, tidak di jembatan dan selokan-selokan,” tuturnya.

Gatot berharap agar Kota Tangerang dapat lebih ‘kreatif, tanggap, siap siaga dan antisipatif’ dalam mengantisipasi bencana alam.

“Lebih tanggap dan terstruktur dalam memberikan pelayanan dan respon terhadap bencana. Selanjutnya dapat membuat rencana operasi yang matang dan baik, serta mampu mengorganisir kegiatan masyarakat yang terkait pengurangan resiko bencana,” katanya.

Hal itu, kata Gatot, telah dituangkan melalui sejumlah rekomendasi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Tangerang tahun anggaran 2023.

“Tentunya hal ini menjadi salah satu perhatian kami, dan itu sudah termasuk dalam rekomendasi yang diberikan DPRD ke Pemkot Tangerang,” katanya.

Diketahui, dalam APBD tahun 2023, yang menjadi skala



GATOT WIBOWO
KETUA DPRD KOTA TANGERANG

prioritas adalah pembangunan di seluruh wilayah, diantaranya rehab kantor kecamatan dan kelurahan pembangunan Puskesmas. Pembangunan gedung sekolah, pembangunan gedung olah raga dan pembangunan Gedung MUI di wilayah kecamatan.

“Tentunya akan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah. Seperti menyempurnakan dan melengkapi infrastruktur drainase, pengendalian banjir, menjaga kondisi infrastruktur jalan kota, jalan lingkungan, serta pengembangan jaringan air minum,” tutup Gatot. ● **joh**